

**PERTANGGUNGJAWABAN TERGUGAT ATAS JUAL BELI TANAH
DALAM PUTUSAN NOMOR: 07/PDT.G/2012/PN.BLG**

ABSTRAK

DAERNI SIAHAAN

203311032015

Timbulnya sengketa hukum tentang tanah berasal dari pengaduan suatu pihak juga badan hukum yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penguasaan hak atas tanah dalam putusan Nomor:07/Pdt.G/2012/Pn.Blg, bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tanah dalam putusan Nomor:07/pdt.g/2012/pn.blg, serta bagaimana pertanggungjawaban tergugat atas jual beli tanah dalam putusan Nomor:07/Pdt.G/2012/Pn.Blg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan hak atas tanah dalam putusan Nomor:07/Pdt.G/2012/Pn.Blg, untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli tanah dalam putusan Nomor:07/Pdt.G/2012/Pn.blg, serta mengetahui pertanggungjawaban tergugat atas jual beli tanah dalam putusan Nomor:07/Pdt.G/2012/Pn.Blg. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah buku-buku serta ketetapan/keputusan pengadilan yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa, penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan Hukum, Tergugat bertanggung jawab atas adanya gugatan pihak ketiga atas adanya akibat dari perjanjian jual beli tanah tertanggal 24 Januari 2011, merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam hal ini kiranya para pihak dalam melakukan jual beli agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi sengketa hukum atas tanah dikemudian hari, mengurus akta PPAT kepemilikan hak atas tanah serta pihak BPN kabupaten Toba samosir kiranya lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam menangani kasus pertanahan.

Kata kunci : Sengketa Tanah, Perjanjian, Jual beli tanah.

**THE DEFENDANT'S LIABILITY FOR THE SALE AND PURCHASE OF
LAND IN JUDGMENT NUMBER: 07/PDT. G/2012/PN. BLG**

ABSTRACT

DAERNI SIAHAAN

203311032015

The emergence of legal disputes about land comes from the complaints of a party as well as a legal entity containing objections and claims for land rights both to the status of the land, its priorities and ownership in the hope of obtaining an administrative settlement in accordance with the provisions of the applicable regulations. The formulation of the problem of this study is how the control of land rights in the judgment Number: 07/Pdt.G/2012/Pn.Blg, how is the validity of the land sale and purchase agreement in the judgment Number: 07/pdt.g/2012/pn.blg, as well as how the defendant is responsible for the sale and purchase of land in the judgment Number: 07/Pdt.G/2012/Pn.Blg. This study aims to determine the control of land rights in judgment Number: 07/Pdt.G/2012/Pn.Blg, to find out the validity of the land sale and purchase agreement in judgment Number: 07/Pdt.G/2012/Pn.blg, as well as to know the defendant's responsibility for the sale and purchase of land in judgment Number: 07/Pdt.G/2012/Pn.Blg. This research uses normative law, namely through library research by examining books and court decrees/decisions that are closely related to the subject matter in the research. The results of this study state that, the control of land rights carried out by Defendant I is an act against the Law, the Defendant is responsible for the existence of a third party lawsuit for the consequences of the land sale and purchase agreement dated January 24, 2011, referring to Article 1365 of the Civil Code. In this case, the parties in conducting the sale and purchase should be more careful so that there are no legal disputes over the land in the future, take care of the PPAT deed of ownership of land rights and the BPN of Toba Samosir regency should further improve the quality of services to the community in handling land cases.

Keywords: Land Disputes, Agreements, Sale and purchase of land.